PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LOVE SCAMMING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Viona Ananta Arianto¹, Mukhlis R², Tengku Arif Hidayat³

vionaananta2004@gmail.com¹, mukhlis@lecturer.unri.ac.id², tengku.arif@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Fenomena Love Scamming sebagai bentuk penipuan digital berbasis relasi asmara semakin marak terjadi di era perkembangan teknologi informasi. Pelaku kejahatan memanfaatkan platform media sosial dan aplikasi kencan untuk membangun hubungan emosional palsu demi keuntungan finansial. Di wilayah Sumatera Barat, kasus Love Scamming menjadi perhatian karena korbannya mayoritas adalah perempuan yang mudah diperdaya oleh modus tipu daya asmara digital. Penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi tantangan tersendiri karena karakteristik kejahatannya yang bersifat siber dan lintas batas. Kepolisian, dalam hal ini Polda Sumatera Barat, memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan ini melalui pendekatan preventif maupun represif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Unit Siber Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat sebagai korban potensial. Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung. Peneliti ini juga menggunakan analisis data secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan dari temuan empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana Love Scamming oleh Polda Sumatera Barat belum berjalan optimal. Upaya preventif seperti penyuluhan digital masih terbatas, dan upaya represif menghadapi kendala dalam pelacakan digital, keterbatasan SDM, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Mayoritas kasus terhenti di tahap penyelidikan karena bukti digital yang sulit diakses dan identitas pelaku yang samar. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto dan teori pembaharuan hukum dari Barda Nawawi Arief. Diperlukan pembaruan sistem dan regulasi, serta peningkatan kapasitas institusional agar kejahatan Love Scamming dapat ditangani secara lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Love Scamming, Cybercrime, Kepolisian, Sumatera Barat.

ABSTRACT

The phenomenon of love scamming, a form of digital fraud based on deceptive romantic relationships, has increasingly emerged in line with the rapid advancement of information technology. Offenders exploit social media platforms and dating apps to build false emotional connections with the intent of financial exploitation. In West Sumatra, this type of crime has raised significant concern, as most victims are women who are easily manipulated by the emotional traps of online romance. Law enforcement efforts face unique challenges due to the cross-border and cyber nature of the crime, placing the West Sumatra Regional Police (Polda Sumatera Barat) at the forefront of both preventive and repressive measures. This study employs a sociological juridical research method with a case study approach. Data were collected through interviews with investigators from Subdirector V of the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) at Polda Sumbar, as well as questionnaires distributed to members of the public considered potential victims. Sources of data included primary legal materials (statutory regulations), secondary materials (legal literature), and tertiary materials as supporting references. The data were analyzed qualitatively and conclusions were drawn using a deductive reasoning method to interpret the empirical findings. The results of the study indicate that law enforcement against love scamming in West Sumatra remains suboptimal. Preventive efforts, such as digital literacy outreach, are still limited in reach and consistency. Repressive measures face obstacles such as difficulties in digital tracking, limited human resources, and weak inter-agency coordination. Most cases stall during the investigation stage due to insufficient digital evidence and anonymous perpetrator identities. The analysis uses Soerjono Soekanto's theory of law enforcement and Barda Nawawi Arief's theory of legal reform. The study concludes that legal

system reform and institutional capacity-building are urgently needed to effectively and fairly combat love scamming crimes.

Keywords: *Law Enforcement, Love Scamming, Cybercrime, Police, West Sumatra.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara heterogen, menonjolkan keberagaman budaya dalam berbagai aspek seperti kebudayaan, adat istiadat, sejarah, agama, suku bangsa, ras, dan bahasa daerah. Di era digital yang semakin maju, interaksi sosial melalui platform online telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.¹ Modernisasi sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Masyarakat saat ini sudah terbiasa menggunakan sistem dan perangkat elektronik. Penggunaan perangkat elektronik dewasa ini dibuat dan dirancang guna semakin modern untuk mewujudkan efisiensi tugas manusia yang terkait dengan pembuatan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi.²

Di era globalisasi, kemajuan teknologi sebagaimana disebutkan diawal, telah menjadi suatu realitas yang harus diterima oleh seluruh elmen lapisan masyarakat, fakta demikian telah mempertegas bahwa masyarakat dunia selalu berkembang secara dinamis mengikuti berbagai situasi dan kondisi perkembangan zaman.³ Salah satu kemajuan besar dalam teknologi dapat dilihat

ketika saat ini banyak pekerjaan manusia yang dipermudah dengan kehadiran mesin dan peralatan digital, seperti hadirnya mobil, handphone, motor, komputer dan laptop merupakan suatu produk yang dihasilkan di era modernisasi ini.⁴ Teknologi sendiri merupakan istilah yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan penelitian. Istilah “teknologi” sendiri berasal dari kata Yunani “techne” yang berarti “kerajinan” dan “logia” yang berarti “mempelajari sesuatu”.⁵ Perkembangan teknis tersebut di atas telah membuka peluang bagi masyarakat untuk segera mengakses segala informasi di seluruh dunia tanpa ada batas wilayah. Menurut beberapa ahli, fenomena ini sering disebut istilah (borderless word), yaitu. dunia tanpa batas, karena setiap orang dapat mengakses berbagai perkembangan dan informasi global dimana pun dan kapanpun mereka mau.⁶

Di Indonesia, kita bisa melihat seberapa besar dampak perkembangan teknologi informasi terhadap nilai-nilai budaya masyarakat, baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kemajuan teknologi seperti media online yang dilengkapi dengan jaringan internet tidak hanya menjangkau elmen masyarakat perkotaan tetapi juga telah dinikmati oleh masyarakat di pelosok desa.⁷ Perkembangan atas teknologi informasi tidak hanya akan berdampak positif bagi manusia sebagai mana disebutkan, namun perkembangan itu juga telah

membawa dampak negatif bagi manusia. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi meliputi antarlain munculnya berbagai pelanggaran hukum dan kejahatan di dunia maya, seperti penyadapan, Penyebaran virus komputer, akses mudah atas pornografi, perjudian, penipuan, serta tayangan kekerasan yang semakin marak. Dengan dampak negatif seperti itu dikhawatirkan akan menimbulkan kejahatan-kejahatan di dunia nyata yang disebabkan oleh karena mengkonsumsi informasi dengan tidak cermat dan bijak, terutama apabila pengguna itu adalah anak-anak.⁸

Internet menjadi suatu kebutuhan tidak terkecuali bagi anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, karena kesadaran akan pentingnya peran internet dalam mendukung berbagai aktivitas sehari-hari semakin meningkat. Internet berfungsi sebagai suatu jaringan komunikasi yang memberikan koneksi cepat dan akurat, menghubungkan berbagai media elektronik satu dengan yang lainnya melalui jaringan global. Kehadiran internet di setiap dunia menunjukkan bahwa globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari bagi masyarakat global.⁹ Kemajuan teknologi dan informatika di era digital ini sangat cepat bahkan hampir semua sektor publik maupun bisnis memakai sistem teknologi berbasis online untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas pelayanan serta berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun konsumen suatu

Perusahaan.¹⁰ Dalam perkembangannya teknologi informasi telah memiliki beragam jenis dan bentuk yang tentu saja dapat memberikan begitu banyak dampak bagi kehidupan manusia, salah satu contohnya adalah media sosial. Media sosial sangat memberi dampak besar dan signifikan dalam kehidupan masyarakat di dunia tidak terkecuali di Indonesia media sosial dapat menjadi jembatan

bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi satu sama lain baik masyarakat antar daerah maupun antar negara, media sosial tak hanya digunakan oleh masyarakat umum saja untuk berkomunikasi namun beberapa perusahaan swasta maupun milik pemerintah kini juga menggunakan media sosial untuk membagi informasi. Dari sini dapat dilihat bahwa banyak sekali dampak- dampak positif yang dapat dihadirkan media sosial bagi kehidupan masyarakat luas, Dengan demikian sebenarnya terdapat banyak juga dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan media sosial.

Salah satu dampak yang sering merugikan masyarakat adalah tindakan penyalahgunaan media sosial oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan media sosial atau media internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moril.¹¹ Aplikasi-aplikasi yang kerap digunakan untuk mencari teman berkencan ataupun untuk sekedar saling berkenalan di antara lainnya adalah Facebook, Whatsapp, Instagram dan juga Datingsapps seperti Tinder. Keunggulan dalam

aplikasi ini yang bisa mempertemukan beragam orang di berbagai belahan dunia untuk saling berkenalan dan berteman di internet sering menjadi hal yang begitu diminati oleh masyarakat tak terkecuali masyarakat Indonesia.¹² Komunikasi melalui media masa tersebut kenyataannya memunculkan sebuah tindak pidana. Kini tindak pidana muncul dilakukan menggunakan metode yang lebih efisien, yaitu menggunakan internet. Bentuk tindak pidana tersebut lebih dikenal dengan tindak pidana dunia maya (cybercrime). Cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan komputer dan jaringan, dalam hal ini tindak pidana umumnya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet.¹³ Dinamika masyarakat yang kompleks diikuti dengan perkembangan teknologi membutuhkan penegakkan hukum. Penegakkan hukum sebagai alat kontrol masyarakat dalam kehidupan. Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan online adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.¹⁴

Negara Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal tersebut termaktub dalam konsep negara hukum Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 ayat

(3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini, negara hukum

tidak hanya mencakup penyelenggaraan negara, tetapi juga mencakup kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.¹⁵ Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Penipuan dilakukan biasanya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dengan keuntungan baik secara materil maupun abstrak.¹⁶

Penipuan berkedok cinta di dunia maya (scammer cinta) dapat dilakukan dengan berbagai modus penipuan. Modus ini sangat mungkin berlangsung dengan awalan lebih mudah. Sebenarnya penipuan jenis scammer cinta ini meliputi banyak bidang yaitu salah satunya dengan cara mengiming-imingi cinta.¹⁷ Kejahatan love scamming pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya faktor ekonomi akan kebutuhan yang mendesak seseorang sehingga timbul kejahatan yang terajdi di dunia maya. Para korbannya tidak hanya laki-laki saja justru mayoritas korbannya adalah perempuan. Pecegahan kasus love scamming di Indonesia juga masih terbilang lemah, penegakan dan pengawasan hukum masih belum optimal, yang mengakibatkan kasus love scamming semakin merajalela

Terkhususnya di Provinsi Sumatera Barat, kasus love scamming di Sumatra Barat telah menjadi isu yang berindikasi dalam beberapa tahun terakhir. Penipuan ini sering kali melibatkan individu yang menjalin hubungan emosional melalui platfrom online, hanya untuk mengeksploitasi perasaan dan kepercayaan korban demi keuntungan finansial. Modus operandi pelaku umumnya serupa, yakni menjalin hubungan emosional dengan korban melalui media sosial. Dalam kasus

tersebut biasanya pelaku Love Scamming menggunakan tindak pidana penipuan sebagai acuan dalam tindakan Love Scamming tersebut. Dan satu di antara kasus ada yang menggunakan tindak pidana pengancaman. Sebagian besar korban adalah perempuan yang terjebak dalam hubungan yang tampak nyata. Setelah hubungan terjalin, pelaku mulai meminta uang dengan berbagai alasan, yang sering kali membuat korban merasa terpaksa memenuhinya.

Berdasarkan data yang telah penulis temukan melalui wawancara, terkait Love Scamming yang terjadi di sumatra barat dengan Pak Surya Ramadhan, S.H, adapun data yang penulis dapatkan akan dipaparkan pada Tabel I berikut.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian hukum sosiologis dengan metode studi kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena hukum dalam konteks sosial. Metode ini melibatkan pengamatan mendalam terhadap kasus atau kejadian konkret untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan diimplementasikan oleh individu atau komunitas tertentu. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara hukum dan masyarakat dalam konteks nyata.

40

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Love Scamming di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial melalui media daring. Namun, kemajuan teknologi tersebut juga melahirkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber (cybercrime), salah satunya adalah tindak pidana Love Scamming. Kejahatan ini semakin marak terjadi seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi kencan daring di Indonesia.⁷²

Love Scamming adalah bentuk penipuan yang dilakukan dengan cara membangun hubungan emosional palsu melalui internet dengan tujuan untuk mengecoh korban dan memperoleh keuntungan finansial. Pelaku biasanya mengaku sebagai warga negara asing, memiliki profesi bergensi (seperti dokter, tentara, pengusaha), dan secara perlahan membangun kedekatan emosional dengan korban. Setelah korban percaya dan merasa jatuh cinta, pelaku mulai meminta uang dengan berbagai alasan, seperti biaya pengiriman barang, pajak, atau keperluan medis.⁷³ Secara hukum, Love Scamming belum memiliki pengaturan khusus dalam hukum pidana Indonesia. Tidak terdapat satu pasal pun

yang secara eksplisit menyebut istilah "Love Scamming" dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, aparat penegak hukum menindak kasus ini dengan menggunakan pasal yang relevan, yaitu:

Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Pasal ini menyoal tindakan tipu muslihat yang membuat orang lain menyerahkan harta benda.

Pasal 378 KUHP

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."⁷⁴

Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU ITE, yang mengatur tentang penyebaran informasi bohong atau menyesatkan dalam transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian finansial.

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.⁷⁵

Kasus Love Scamming memiliki unsur-unsur yang memenuhi rumusan pasal tersebut, seperti:

Adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggunakan tipu muslihat atau kebohongan, Menggerakkan korban untuk menyerahkan harta dilakukan melalui media elektronik atau daring. Namun, penanganan kasus Love Scamming tidak semudah kejahatan penipuan konvensional. Pelaku biasanya menggunakan identitas palsu, berada di luar negeri, dan berkomunikasi hanya melalui akun media sosial. Hal ini menyulitkan proses penelusuran identitas dan pengumpulan alat bukti oleh kepolisian. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya pemahaman hukum masyarakat terhadap kejahatan siber, khususnya Love Scamming. Banyak korban yang tidak segera melapor karena rasa malu atau takut mendapat stigma dari lingkungan. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi terhambat dan korban semakin dirugikan secara finansial dan psikologis. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menekan dan mengendalikan angka kejahatan Love Scamming baik melalui pendekatan represif seperti penindakan hukum terhadap pelaku, maupun upaya preventif seperti edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat. Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Love Scamming sangat bergantung pada sinergi antarinstansi penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (khususnya Direktorat Reserse Kriminal

Khusus), Kejaksaan, serta lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam ranah siber dan keuangan. Selain itu, keberhasilan penanggulangan tindak pidana Love Scamming juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta membantu aparat penegak hukum dalam memberikan informasi dan melaporkan apabila menemukan adanya indikasi penipuan daring berbasis asmara tersebut. Dengan demikian, kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci dalam upaya memberantas tindak pidana Love Scamming secara menyeluruh.

Dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana Love Scamming di Polda Sumatera Barat dilakukan oleh subdit V Cyber Crime Diterskrimsus. Penanganan terhadap kejahatan ini dimulai dari laporan masyarakat, pelacakan akun digital, permintaan data kepada platform media sosial (jika memungkinkan), hingga pemanggilan saksi dan tersangka. Hal ini dapat dilihat melalui data yang di dapatkan penulis dari BA Unit 1 Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif adalah usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan tindak pidana Love Scamming itu adalah pemerintah dan masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Sumbar antara lain sebagai berikut:⁷⁷

2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum Represif adalah pemberian hukuman atau sanksi kepada pelanggar untuk mencegah terulangnya pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial. Upaya Represif dilakukan sebagai langkah penindakan setelah terjadinya tindak pidana Love Scamming. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan kejahatan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat dari korban berikutnya. Upaya Represif yang dilakukan oleh Polda Sumbar yakni dengan:⁷⁸

Kendala yang Dialami Pihak Kepolisian Polda Sumatera Barat dalam Menangani Love Scamming di Provinsi Sumatera Barat

Tindak pidana Love Scamming merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat seiring dengan peningkatan penggunaan internet dan media sosial. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memperdaya korban melalui

hubungan romantis palsu yang dibangun secara daring, kemudian memanipulasi korban untuk memberikan sejumlah uang atau data pribadi. Fenomena ini semakin meresahkan karena tidak hanya menyebabkan kerugian materil, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Penanggulangan terhadap kejahatan Love Scamming memerlukan pendekatan yang menyeluruh, karena karakteristiknya yang kompleks dan lintas batas yurisdiksi. Kepolisian tidak hanya dituntut untuk bertindak setelah kejahatan terjadi (represif), tetapi juga harus melakukan tindakan pencegahan (preventif) guna menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap modus-modus penipuan daring ini. Dalam hal ini, Kepolisian Daerah Sumatera Barat memiliki peran penting dalam membangun sistem penanganan yang tidak hanya reaktif, melainkan juga proaktif dan edukatif. Secara umum, upaya penanggulangan terbagi menjadi dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif, upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, literasi digital, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan online. Sementara upaya represif berfokus pada penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan, serta kerja sama lintas instansi dalam pelacakan dan penindakan kasus yang bersifat transnasional.

Secara umum tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang

bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil.⁸² Pemaknaan tugas penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya akan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.⁸³

Provinsi Sumatera Barat, Khususnya wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, menjadi salah satu wilayah yang berindikasi memiliki kasus tindak pidana Love Scamming yang terus terjadinya setiap tahunnya, khususnya pada periode 2021-2023. Penyidikan tindak pidana Love Scamming menghadapi berbagai hambatan yang kompleks terutama yang berkaitan dengan regulasi dan teknis dalam pengumpulan bukti digital. Hambatan tersebut tidak hanya memperlambat proses penyelidikan tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Salah satu kendala utama yang dihadapi penyidik adalah keterbatasan akses terhadap data perbankan, yang sering kali menjadi kunci dalam mengidentifikasi pelaku dan aliran dana.

Upaya yang Dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Menangani Tindak Pidana Love Scamming di Provinsi Sumatera Barat

Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, kejahatan digital juga mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu bentuk kejahatan siber yang kini marak terjadi adalah tindak pidana Love Scamming, yaitu modus penipuan yang dilakukan melalui hubungan emosional atau percintaan daring. Di provinsi Sumatera Barat, kasus Love Scamming menjadi perhatian serius karena telah menimbulkan kerugian materi dan psikologis bagi masyarakat. Korban umumnya berasal dari kalangan perempuan dewasa yang mudah dipengaruhi oleh rayuan pelaku melalui media sosial atau aplikasi kencan daring. Tindak pidana Love Scamming memiliki

karakteristik yang berbeda dengan bentuk penipuan konvensional. Pelaku memanfaatkan identitas palsu, foto yang dicuri, serta akun media sosial fiktif untuk membangun relasi romantis yang meyakinkan. Setelah korban percaya, pelaku mulai meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan, seperti untuk biaya pengobatan, visa, atau urusan darurat lainnya. Karena dilakukan secara daring dan sering melibatkan pelaku dari luar negeri, kejahatan ini sulit dideteksi dan ditindak secara langsung oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah.

Sebagai institusi penegak hukum di daerah, Kepolisian Daerah Sumatera Barat memiliki tanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital, termasuk Love Scamming. Tugas penanganan kasus ini berada

di bawah koordinasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), khususnya Subdit V Siber. Selain melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat, Polda Sumbar juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum dan kewaspadaan digital di kalangan masyarakat. Penanganan terhadap tindak pidana Love Scamming dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, data lapangan, wawancara dengan pihak Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, serta analisis menggunakan teori penegakan hukum dan teori pembaharuan hukum, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana love scamming di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan hukum khusus mengenai Love Scamming dalam KUHP maupun ITE, sehingga aparat penegak hukum hanya mengandalkan pasal-pasal umum seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, proses hukum sering terhenti di tahap penyelidikan karena keterbatasan alat bukti, sulitnya melacak pelaku yang menggunakan identitas palsu, serta rendahnya pelaporan dari korban akibat rasa malu atau ketakutan terhadap stigma sosial.
2. Kendala utama yang dihadapi Polda Sumatera Barat dalam menangani Love Scamming adalah rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologidigital forensik, belum adanya kerja sama yang kuat dengan platform digital, serta minimnya regulasi atau payung hukum yang spesifik. Selain itu, keterbatasan anggaran, sarana, dan fasilitas dalam proses penyelidikan turut menghambat efektivitas penanganan kasus. Masyarakat juga dinilai masih kurang aktif dalam melaporkan kasus, dan cenderung tidak mengetahui jalur hukum yang bisa ditempuh.
3. Upaya yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat terbagi menjadi dua pendekatan, yakni preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, peningkatan literasi digital, sosialisasi di media sosial dan sekolah, serta edukasi publik mengenai bahaya Love Scamming. Sementara upaya represif meliputi penyelidikan dan penyidikan kasus, pelacakan akun palsu, serta kerja sama dengan pihak lain seperti penyedia layanan digital dan institusi hukum nasional. Namun demikian, pelaksanaan kedua pendekatan ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal pelatihan teknis penyidik, jangkauan edukasi ke seluruh wilayah, dan dukungan infrastruktur teknologi.

Saran

1. Polda Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya penyidik dalam bidang digital forensik dan investigasi siber. Polda juga perlu memperkuat kerja sama dengan penyedia platform media sosial dan lembaga internasional agar pelacakan dan penindakan pelaku Love Scamming lintas negara dapat lebih efektif. Perlu pula dilakukan pelatihan berkala serta pengadaan alat pendukung penyidikan berbasis teknologi.

2. Peningkatkan kinerja aparat penegak hukum diperlukan pembaruan sistem kerja internal kepolisian dalam menangani kejahatan siber seperti Love Scamming, termasuk melalui optimalisasi unit siber yang ada, evaluasi berkala terhadap efektivitas penanganan kasus, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga penegak hukum. Aparat juga diharapkan lebih responsif terhadap laporan masyarakat dan menerapkan pendekatan berbasis teknologi informasi dalam setiap tahap penyidikan.
3. Masyarakat diharapkan agar masyarakat lebih waspada dalam menggunakan media sosial dan aplikasi kencan online, serta meningkatkan literasi digital guna menghindari menjadi korban Love Scamming. Masyarakat juga diharapkan tidak segan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialami ke pihak kepolisian, serta mengikuti sosialisasi dan edukasi hukum yang dilakukan aparat penegak hukum maupun lembaga swadaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Prkmj, ofesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- ahardjo, *Raharjo Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2002)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm. 134. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- H. Sutarwan, *CIBER CRIME: Modus Operandi Dan Penanggulangannya*, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2007)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2008.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2014
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006).
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012
- Juhriyansyah Dalle. et.al, 2020, *Pengantar Teknologi Informasi*, Depok, Rajawali Pers
- M. Arsyad Sanusi, 2007, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris – Yuridis)*, Jakarta: The Indonesian Rearch.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Momo Kelana, *Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif*, PTIK, Jakarta, 1972.
- Mulyasari, *Rineka Cipta*, Jakarta, 2009.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Piliang dan Yasraf Amir, *Public sphere' dan cyber-democracy'*, media internet sebagai kekuatan alternatif Demokrasi & HAM, Yogyakarta: IRE PRESS, 2000.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015. Raharjo, Budi, *Memahami Teknologi Informasi*. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal DemiPasal*, Politeia: Bogor,1996, hlm. 260.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Setiawan, Daris, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005)

Sri Hajati, et.al, 2019, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press.

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita*

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV Ramadja Karya, Bandung, 1988.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Sudarsono. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Ukas, 2020, *Pemahaman Hukum Ekonomi Indonesia*, Pekanbaru, Cv Batam Publisher.

Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011 Zainuddin Ali, "Filsafat Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Makalah Hukum, Jurnal Hukum dan Tesis

Afrianda Yusnu Pratama, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Skripsi, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Universitas Jambi, 2022, hlm. 10.

Ardiansyah Kartadinata, *Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hakim Praperadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 06 No. 01 Januari 2023, hlm. 64.

Charlie Doma Putra, Yuliandre Darwis, "Strategi Komunikasi Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat", *Artikel Pada Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas, Vol. 01 No. 03 Januari-Maret 2024

Dita Rizqita Sari, "Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba di Wilayah Provinsi Lampung", *Artikel pada Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1 Maret 2024

Ferdinandus kila, et.al., *Pertanggungjawaban Pidana Tnpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 4 No 1 – Januari 2023, hlm. 29.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Vol. 13, No. 1 Januari 2019

Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, Sopian, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, Vol. 5, No. 2 Oktober 2022

ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam", *JurnalAnalogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Vol. 5, No. 1 Maret 2023

Johny, R. H. (2011). *Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (Studi etiologi kriminal di wilayah hukum Polres Banyumas)*. *Jurnal Dinamika Hukum*

Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Cinta)", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Edisi 2720, No.913 Oktober 2020

Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Cinta)", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Edisi 2720, No.913 Oktober 2020

Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* Volume 2, Nomor 1, Tahun 2014, hlm 33-47

Nur Fadilah Amin, "Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian", *Artikel Pada Jurnal Pilar*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 14, No. 1, Juni 2023

Palupi Sulistyoningrum, "Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Love Scamming dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya", *Skripsi, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2024

Pudji Setiawan, "Pertanggung jawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Love Scamming Dalam Dunia Maya", *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik*, 2024

- Putri, Ni Kadek Dinda Sephia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Modus Love Scam Dalam Situs Kencan Online di Indonesia", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 2024
- Putu Sekarwangi Saraswati, I Nengah Susrama, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital, Prosiding Seminar Nasional FH Unmas Denpasar, Vol. 1 No. 1, 2021
- Rizki Daffa Abiyyu, "Modus Operandi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui Love Scamming Menggunakan Dating Apps di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024
- Rizka Alifia Zahra, "Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix 'The Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 10, No. 1 Juli 2022
- Sultan, "Love Scamming Dalam Jerat Hukum Pidana" Jurnal Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, Vol. 8, No.2 Desember 2024
- Vidyantina Heppy Anandhita, 2015, Pemanfaatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi edisi Tahun 2015, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hlm 1
- Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2012
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.